

Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan: Pengalaman Indonesia

Dr. Halim Alamsyah

Ketua Dewan Komisioner

Universitas Airlangga

Surabaya, 8 November 2017



Outline

- Kerangka Kerja Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)
 - Pengalaman Krisis Moneter: 1997-1998
 - Pengalaman Krisis Global: 2007-2008
 - Pengalaman Penanganan Akselerasi Kredit Konsumsi dan Geliat Sektor Properti : 2010-2013
 - Catatan Akhir
- 



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

KONSEP PENGELOLAAN SSK





Beberapa Definisi Stabilitas Sistem Keuangan

“...define financial stability as an absence of instability....a situation in which **economic performance is potentially impaired by fluctuations in the price of financial assets or by an inability of financial institutions to meet their contractual obligations...**” (BIS, 1997)

...financial instability "occurs when shocks to the financial system interfere with information flow so that **the financial system can no longer do its job of channeling funds to those with productive investment opportunities**" (Mishkin, 1999)

financial stability can be defined as “a condition in which the financial system – comprising financial intermediaries, markets and market infrastructure – is **capable of withstanding shocks and the unravelling of financial imbalances**, thereby mitigating the likelihood of disruptions in the financial intermediation process which are severe enough to significantly impair the allocation of savings to profitable investment opportunities” (ECB, 2007)



Sasaran dan Instrumen Kebijakan SSK

Sasaran kebijakan SSK:

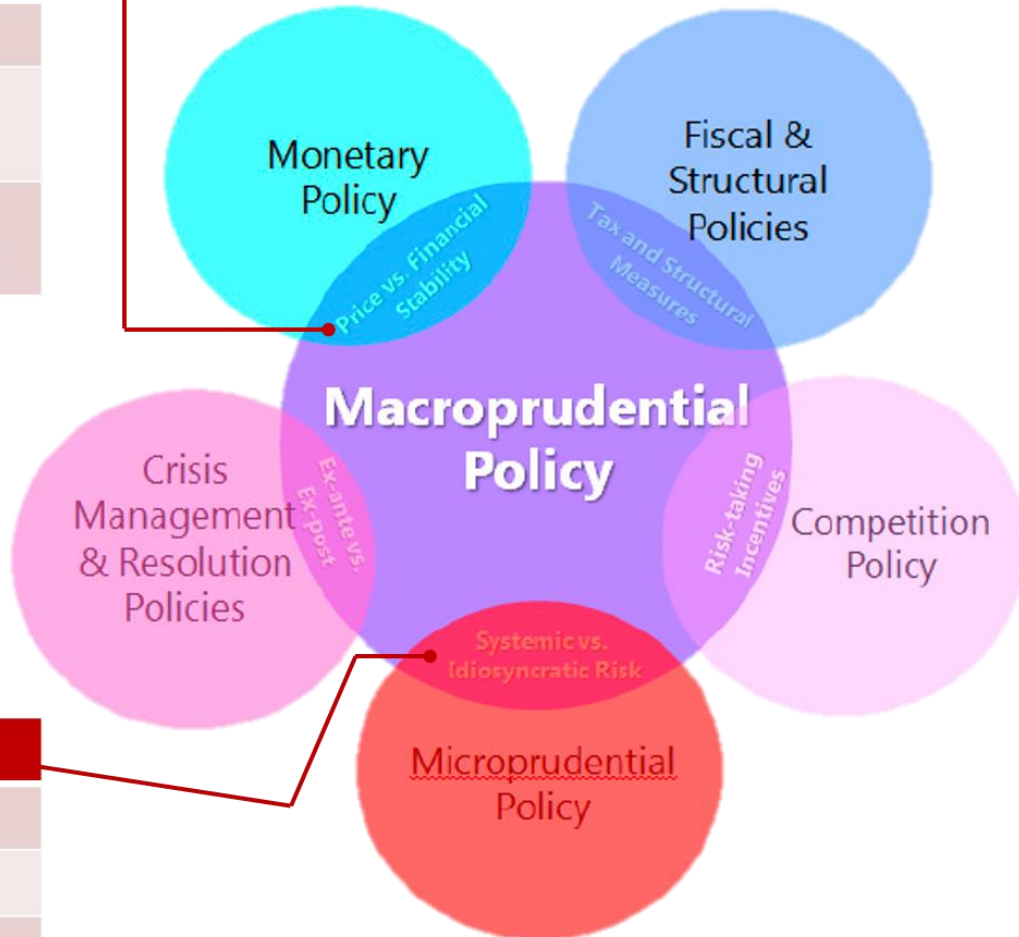
- Mencegah terjadinya akumulasi risiko-risiko (risiko sistemik) yang dapat mengganggu (*disruptions*) berjalannya fungsi sistem keuangan sehingga berpotensi menimbulkan krisis sistem keuangan-ekonomi
- Menangani krisis keuangan secara cepat dan efektif

Instrumen kebijakan SSK:

Berupa bauran (*policy mix*) yang mencakup kebijakan di bidang (1) Moneter; (2) Fiskal; (3) makroprudensial dan mikroprudensial; (4) Pasar Keuangan; (5) infrastruktur keuangan; dan (6) resolusi Bank.

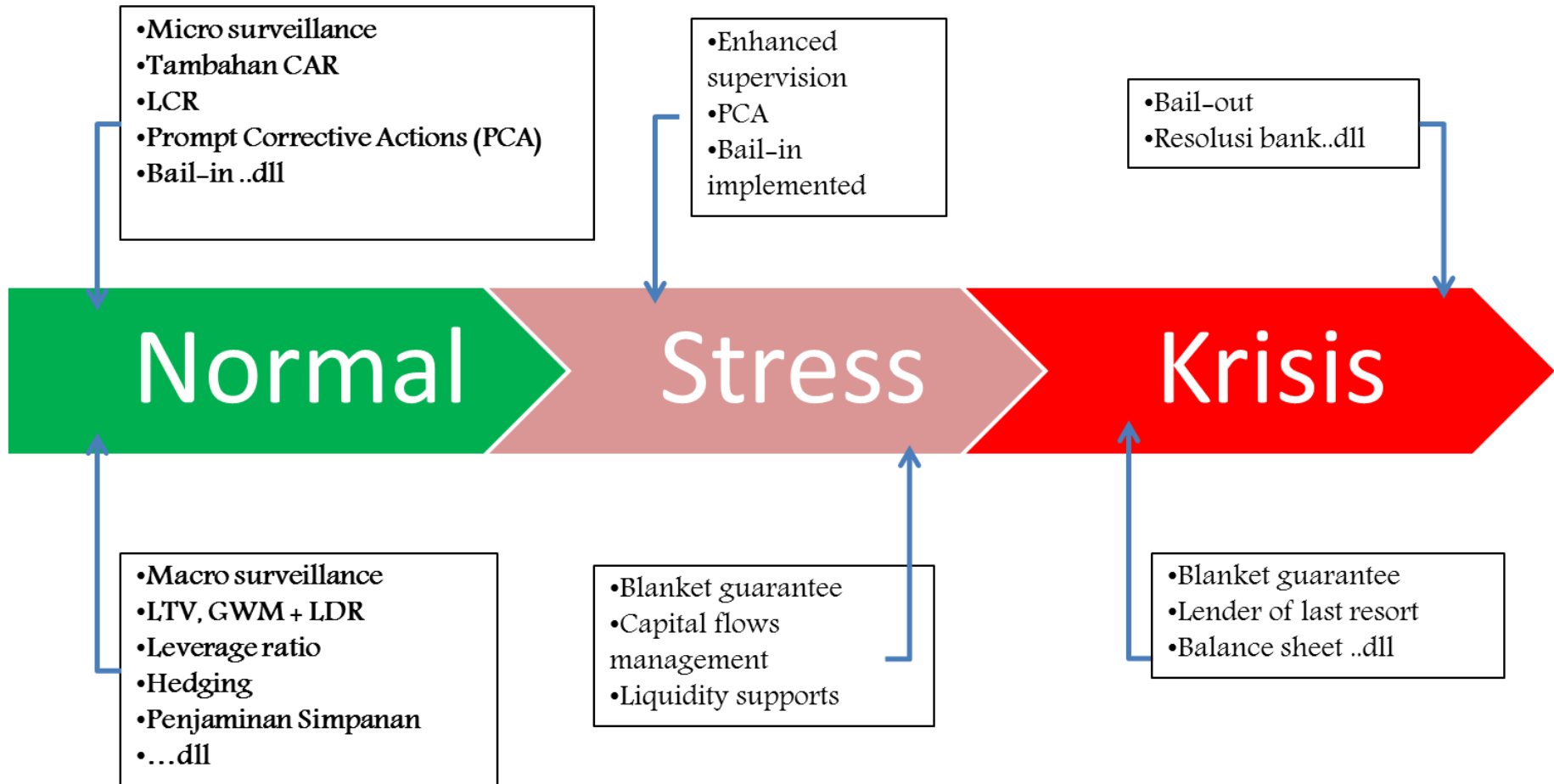
Cakupan Analisis Kebijakan SSK

Moneter	Macroprudential
Price	SSK
Business Cycle	Financial Cycle
Flows Analysis	Stock Analysis (Balance Sheet)



Micro	Macro
Idiosyncratic	Systemic
Seluruh Bank	DSIB
Plain Vanila	Thematic

Kerangka Kerja, cakupan, instrumen Kebijakan SSK





LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

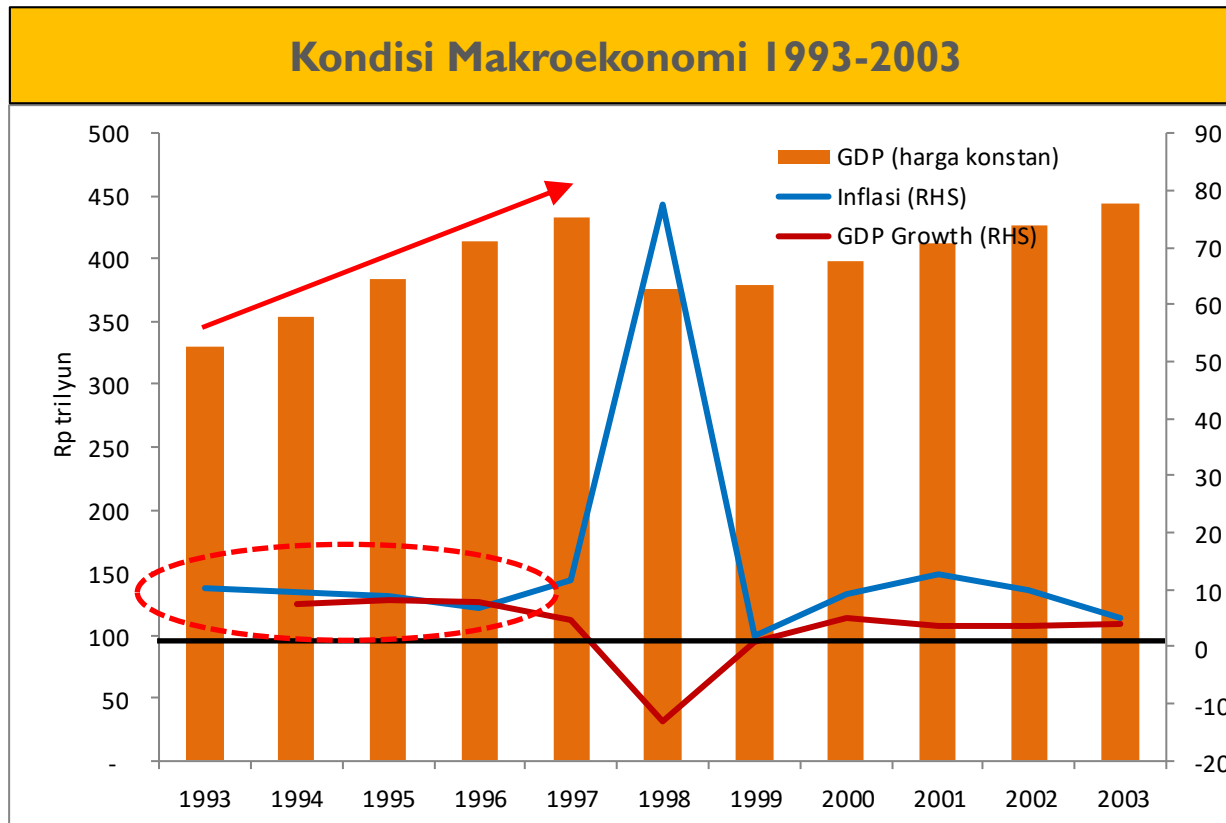
Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

KRISIS MONETER: 1997/1998



Menjelang Krisis Keuangan 1997/98

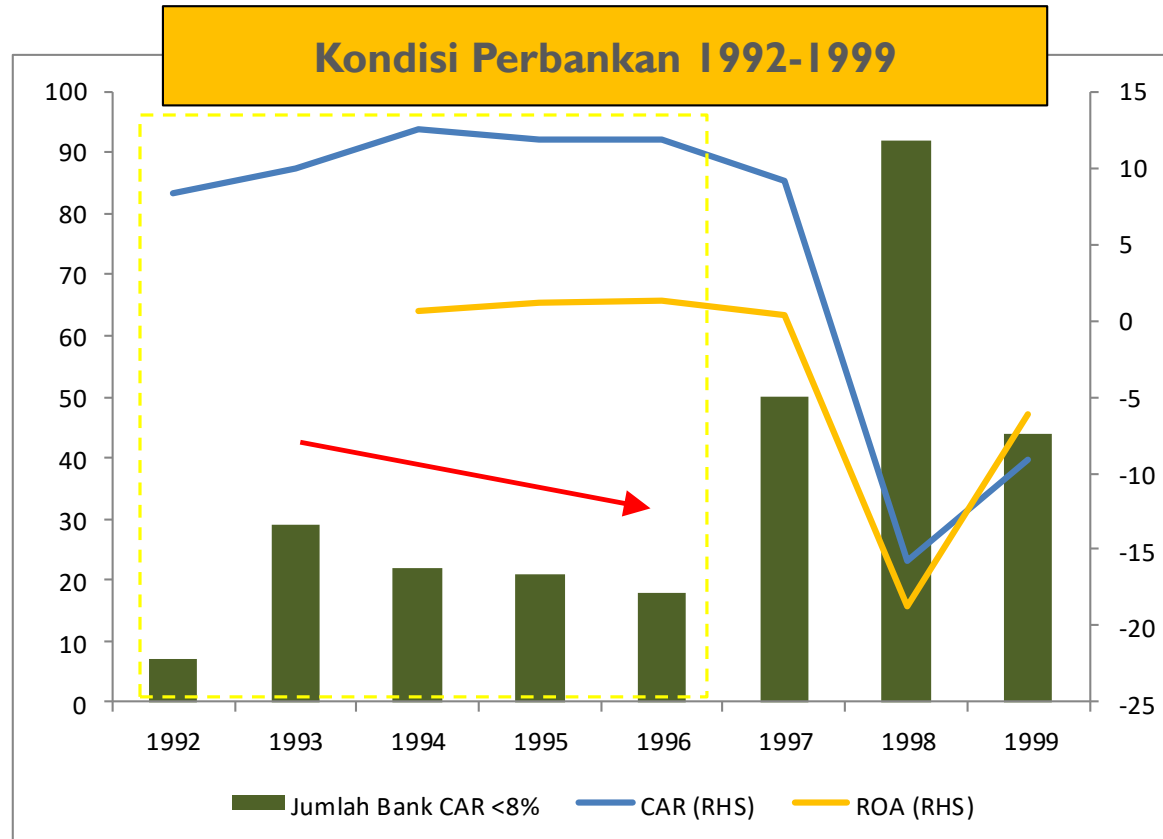
... Kondisi makroekonomi dan moneter sebelum krisis menunjukkan kondisi normal.....kondisi fundamental ekonomi Indonesia “sehat”?



Hal ini menunjukkan bahwa kondisi **Makroekonomi dan Moneter** cukup baik.

Kondisi Perbankan Indonesia menjelang Krisis

... Dari sisi pengawasan mikroprudensial, tidak terlihat adanya perubahan signifikan pada kondisi perbankan sebelum krisis.....



Namun demikian, kondisi pre-crisis tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Penilaian beberapa risiko cenderung underestimated, sehingga CAR bank tidak mencerminkan level risiko riil perbankan.

Fundamental Ekonomi- Keuangan Indonesia

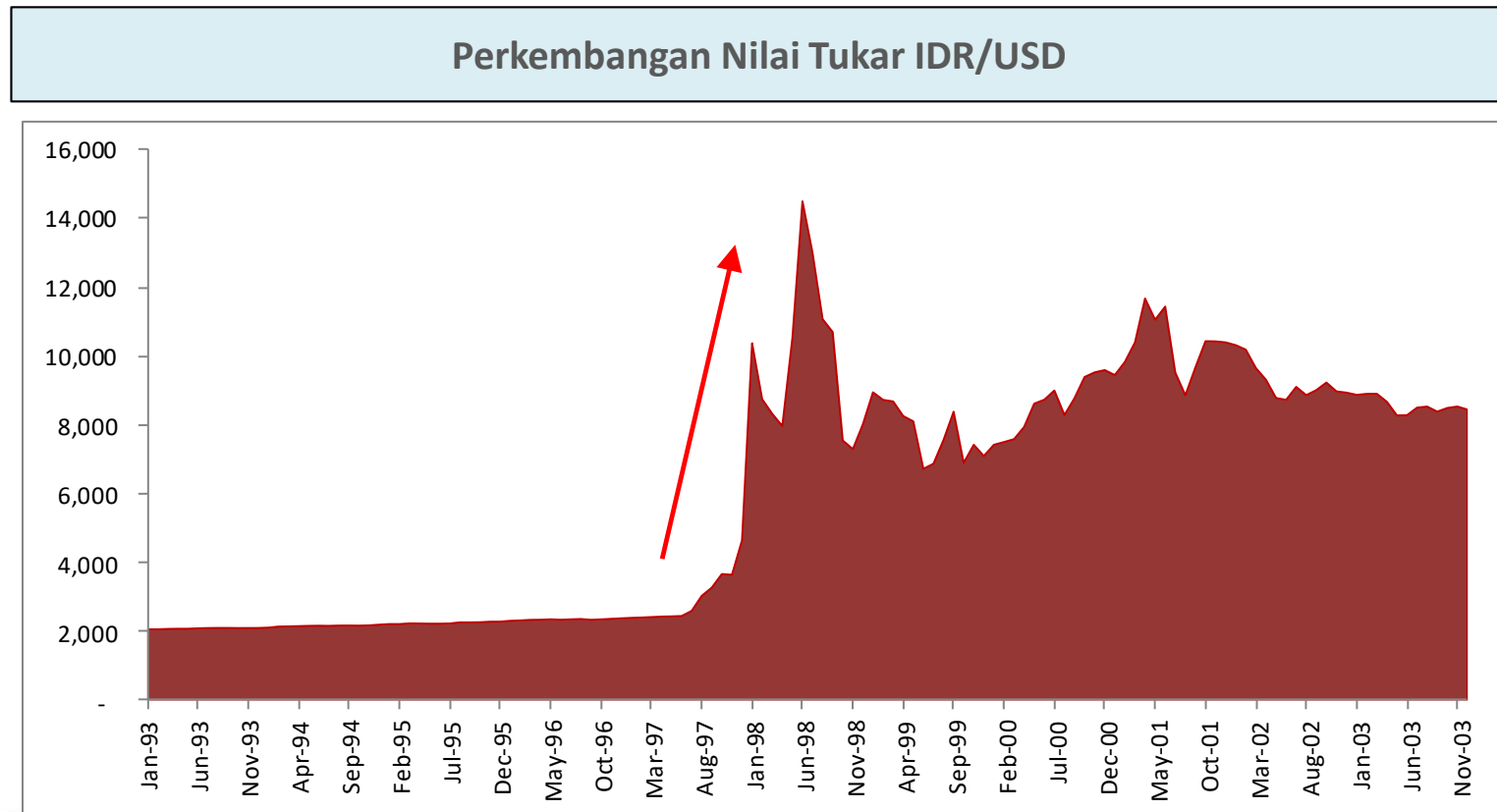
... Apakah kondisi Indonesia lebih baik dari negara-negara Asia lain menjelang krisis 1997/1998?

	Indonesia	Korea	Thailand	Malaysia
Domestic Debt to GDP ratio (1992-1996)	50	50	87	82
Family-Owned-Company (1991-1996)	67.3	24.9	51.9	42.6
State-Owned-Company (1992-1995)	15.2	19.9	24.1	34.8
Credit Growth (1992-1996)	12	15	37	38
Non-Performing Loan (1996)	8.8	0.8	7.7	3.9
Non-Performing Loan (1998)	40	20	34	19
Short-term Debt to Reserve Ratio (1996-1997)	188.9	217	121.5	45.3
Current Account (1991-1995)	-2.4	-1.8	-7.7	-7.6
Current Account (1996)	-3.2	-4.4	-8.9	-4.4

*Dibandingkan negara Asia lain yang juga mengalami krisis keuangan 1997/1998, terdapat kemiripan dalam hal **rasio Short-term Debt to Reserve, NPL dan Current Account Deficit (CAD)**. Ketiga hal tersebut menunjukkan adanya imbalances dalam sistem keuangan yang tidak terdeteksi dengan baik pada saat itu.*

Krisis Keuangan Indonesia 1997/98

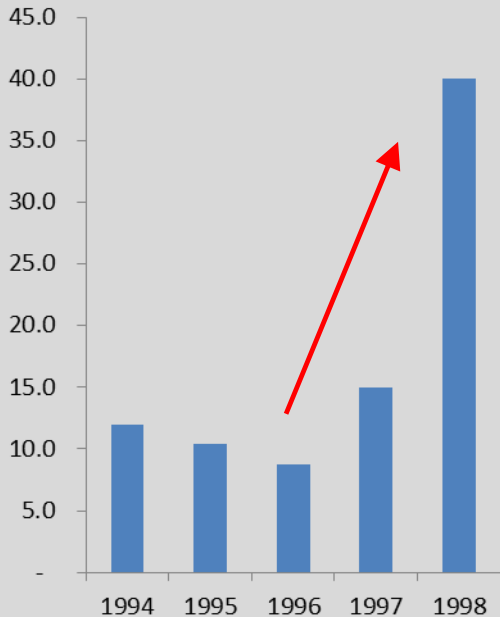
... Secara tiba-tiba nilai tukar Rupiah terhadap USD anjlok pada pertengahan tahun 1997, dan mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1998. *What Went Wrong?*



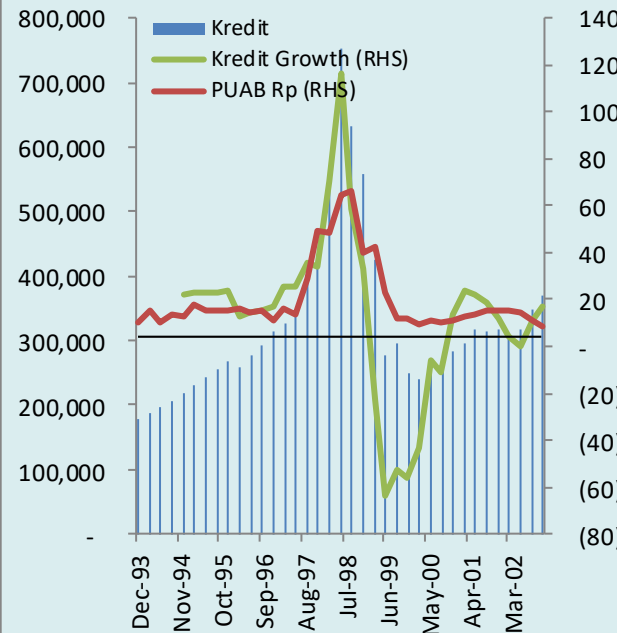
Krisis Keuangan Indonesia

... Terdapat financial imbalances yg tidak terdeteksi ... Beberapa risiko cenderung underestimated: Risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar (mismatch ULN).

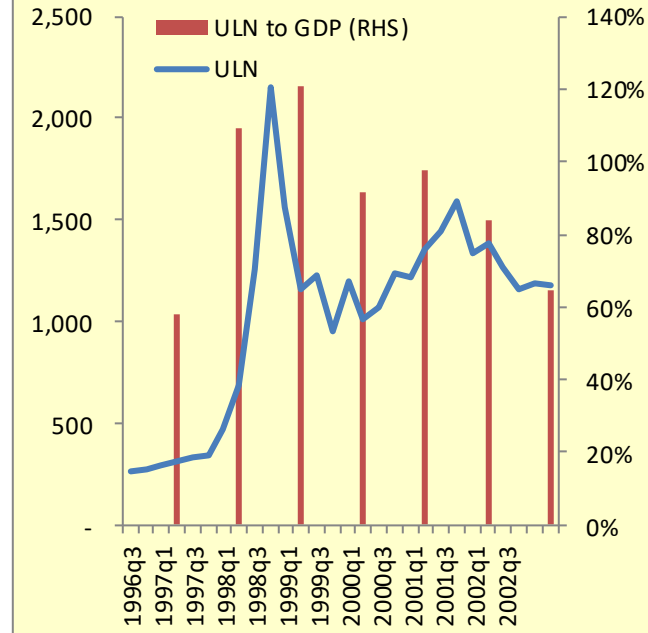
Rasio NPL (%)



Perkembangan Kredit & PUAB (Rp Milyar dan %)



ULN & PUAB (Rp Trilyun dan %)



Risiko Kredit

Penerapan prinsip kehati-hatian buruk, a.l. sering terjadi pelanggaran BMPK (buruknya manajemen risiko konsentrasi) karena pemilik bank dan debitur saling terkait. Rendahnya kualitas aset terlihat dari lonjakan NPL pd saat krisis.

Risiko Likuiditas

Ekspansi kredit yg cukup tinggi sebelum krisis (15-35%) mendorong persaingan pendanaan dan suku bunga pasar tinggi serta meningkatkan risiko likuiditas

Mismatch ULN

Tingginya persaingan dana domestik mendorong peningkatan ULN. Pre-krisis: USD 130 milyar (58% GDP), sebagian besar unhedged dan 25% berjangka waktu pendek. Kondisi ULN, regime nilai tukar (partially fixed) dan cad. devisa yg relatif rendah (USD 19.2 milyar) menyebabkan sistem keuangan rentan thdp pergerakan pasar.





Pelajaran Krisis 1997-1998

- 1. Fokus kepada stabilitas makroekonomi saja tidak cukup -> SSK**
 - Sisi mikroekonomi spt GCG di sektor swasta dan perbankan hrs diperkuat
 - Tingkat keberhutangan (leverage), baik DN dan LN, perlu dipantau dgn ketat
 - Daya saing nasional perlu dipantau dgn baik
 - Penguatan Crisis Management Protokol
- 2. Pengawasan Perbankan/LK harus diperkuat**
 - Aturan2 hrs diperkuat sesuai dgn best international practice
 - Enforcement oleh lembaga pengawas yang independen
- 3. Konsolidasi Perbankan harus dilakukan**
 - Penguatan struktur, permodalan, aturan operasional, GCG, manajemen risiko dll
- 4. Perlindungan dan Peningkatan Kepercayaan Nasabah hrs diperkuat**
 - Pembentukan LPS
 - Transparansi informasi ttg produk2 dan posisi keuangan Bank/LK



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

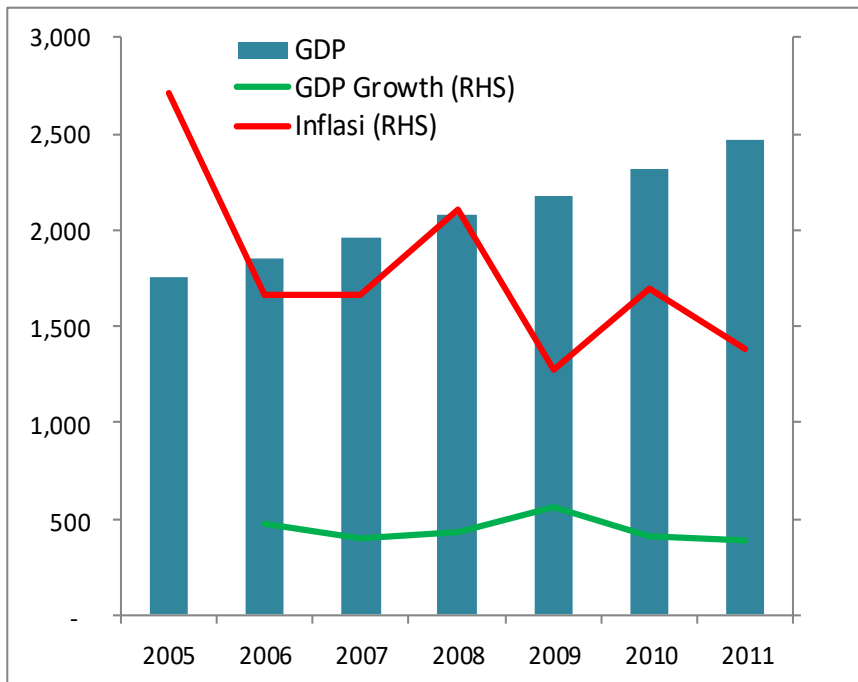
KRISIS GLOBAL: 2007-2008



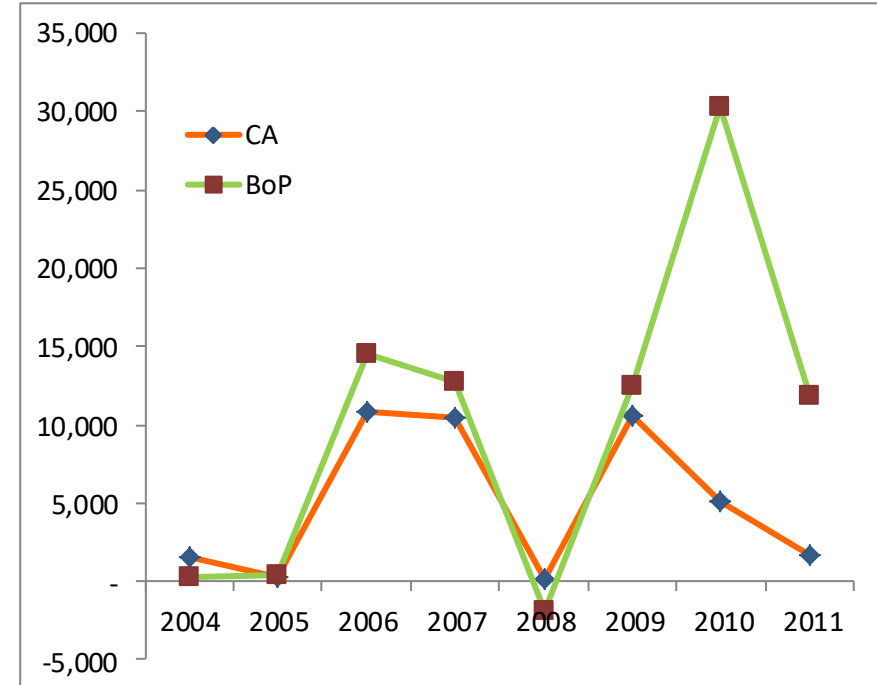
Ketika Krisis Keuangan Dunia Terjadi di 2007/08...

... Ketika GFC 2007 melanda Indonesia, guncangan terbesar dialami oleh Kurs Rp sbg akibat capital outflows ...

GDP & Inflasi
(Rp trilyun & %)



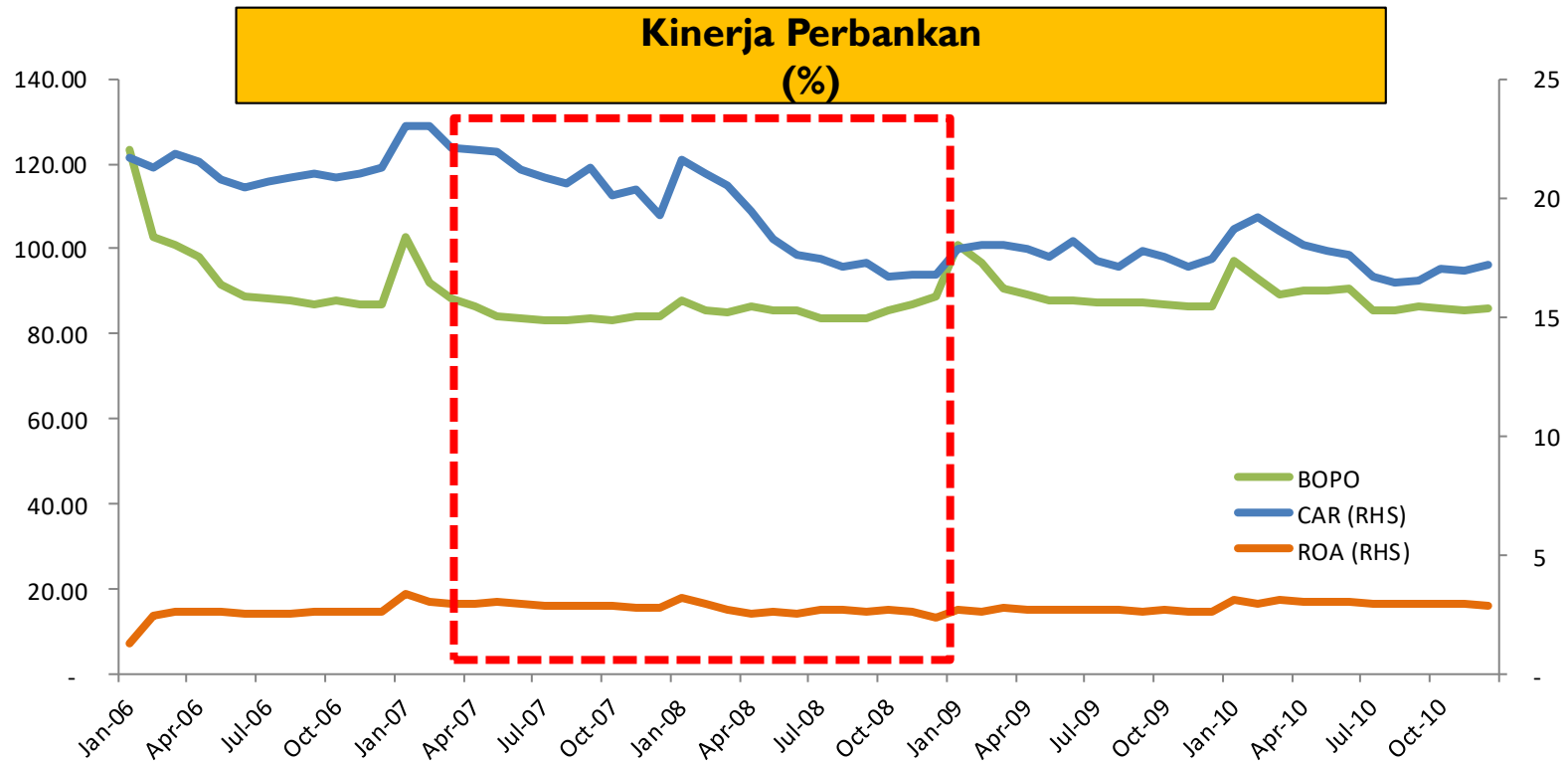
Current Account & BoP
(USD milyar)



- Pre-GFC 2008, kondisi makroekonomi dan moneter domestik cukup baik, terlihat dari pertumbuhan GDP dan inflasi yg terjaga.
- Dampak spillover krisis dari negara lain terlihat pada capital outflow dan inflasi yang meningkat di tahun 2008.

Krisis Keuangan Global

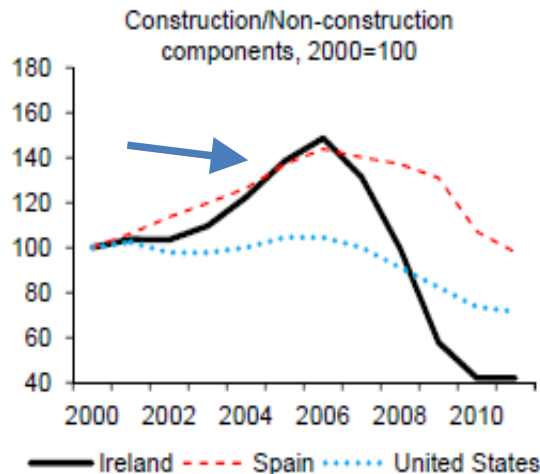
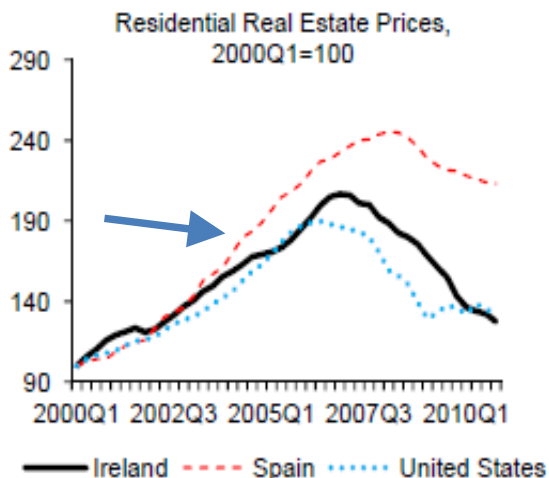
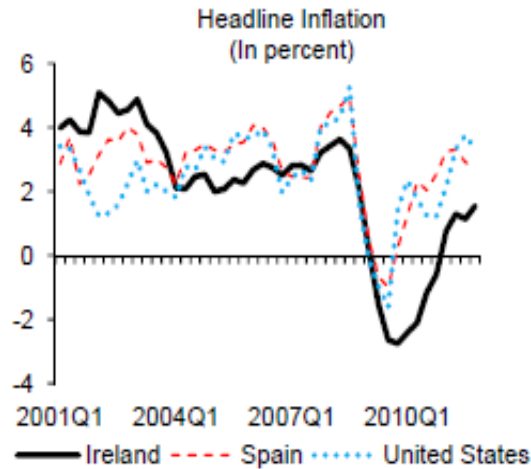
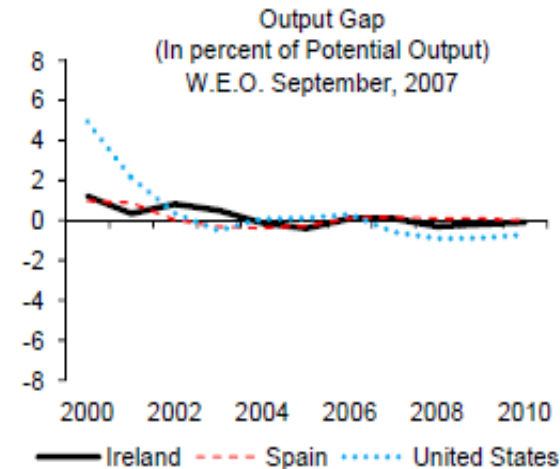
... Namun, kondisi perbankan domestik tetap terjaga dengan baik ...



- *Kondisi perbankan sedikit terganggu tapi tetap terjaga, meskipun terdapat penurunan CAR yang cukup signifikan pada tahun 2008. Regulator dan Industri telah belajar dari pengalaman krisis 1997.*
- *Adanya permasalahan dalam penanganan bank gagal mengindikasikan perlunya framework yg lebih jelas mengenai penanganan krisis (CMP), mekanisme koordinasi lintas institusi dan penetapan bank berdampak sistemik.*

Krisis Keuangan Global

...Bagaimana dengan negara-negara lain? ...



Source: World Economic Outlook and Haver Analytics

- Dengan fokus pada price stability, **risiko sistemik sistem keuangan tidak teridentifikasi** dengan baik dalam era Great Moderation.
- Pre-krisis, negara Irlandia, Spanyol dan USA (semuanya subsequently menderita krisis) **memiliki output gap yg relatif flat, inflasi stabil atau meningkat secara moderat.**
- Namun dari sisi keuangan, **kredit dan harga asset meningkat pesat** sehingga menyebabkan distorsi dalam komposisi output. Distorsi tersebut bersama-sama dengan excessive investasi pd real estate menyebabkan kondisi sistem keuangan rentan terhadap gejolak pasar.
- Semakin nyata perlunya **kebijakan dan pengawasan makroprudensial.**



Pelajaran Yang Dapat Kita Petik?

- 1. Bubble di sektor properti merupakan hal yang perlu diantisipasi dgn baik**
- 2. Penguatan fundamental sektor perbankan baik dari sisi permodalan, likuiditas maupun kemampuan manajemen risiko yang lbh baik harus segera dilakukan**
- 3. Pemahaman yang lbh baik tentang penyebaran risiko di sektor keuangan secara menyeluruh:**
 - “Memindahkan” risiko ke pihak lain dgn menggunakan CDS tidak berarti melakukan diversifikasi risiko.
 - Transparansi atas risiko2 dari produk2 derivatif
- 4. Peran Rating Agency terlalu kuat sehingga perlu disempurnakan**
- 5. Pemantauan yang lebih intrusif thd kegiatan di sektor perbankan dan keuangan**
- 6. Pengendalian yang lebih baik thd Shadow Banking**
- 7. Resolusi Bank/LK yang efektif dan least cost**



Respon Global pasca *Great Financial Crises*

G20 meminta Financial Stability Board (FSB) untuk merancang respons kebijakan keuangan untuk mencegah berulangnya GFC. Inisiatif perbaikan di bidang keuangan dirancang untuk menjaga STABILITAS SISTEM KEUANGAN melalui:

1. Peningkatan **Permodalan, Likuiditas**, GCG serta Manajemen risiko Lembg Keuangan (LK)
2. Perbaikan kualitas dan efektivitas **regulasi prudensial dan supervisi** atas LK
3. **Resolution regimes** yang tepat utk LK
4. **Pencatatan transaksi derivative** melalui exchange
5. Pengendalian **praktik kompensasi** di dlm LK
6. **Kerjasama Cross Border** dlm mengawasi G-SIFI
7. Pengendalian **shadow banking**
8. Pengaturan **credit rating agencies**



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

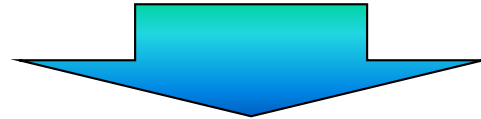
Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

AKSELERASI KREDIT KONSUMSI DAN GELIAT SEKTOR PROPERTI DI INDONESIA: 2010 – 2013



Indonesian Experience:

Analisis terhadap sumber ketidakseimbangan finansial dalam siklus keuangan 2009-2013 menunjukkan adanya 3 fenomena yang terjadi pada saat yang bersamaan



Sources of Vulnerabilities and Financial Risks

Excessive Lending Growth

- Potentially can increase credit risks and liquidity risks in the banking sector. Consequently, interest rates may also increase

Price Bubbles in Property sector

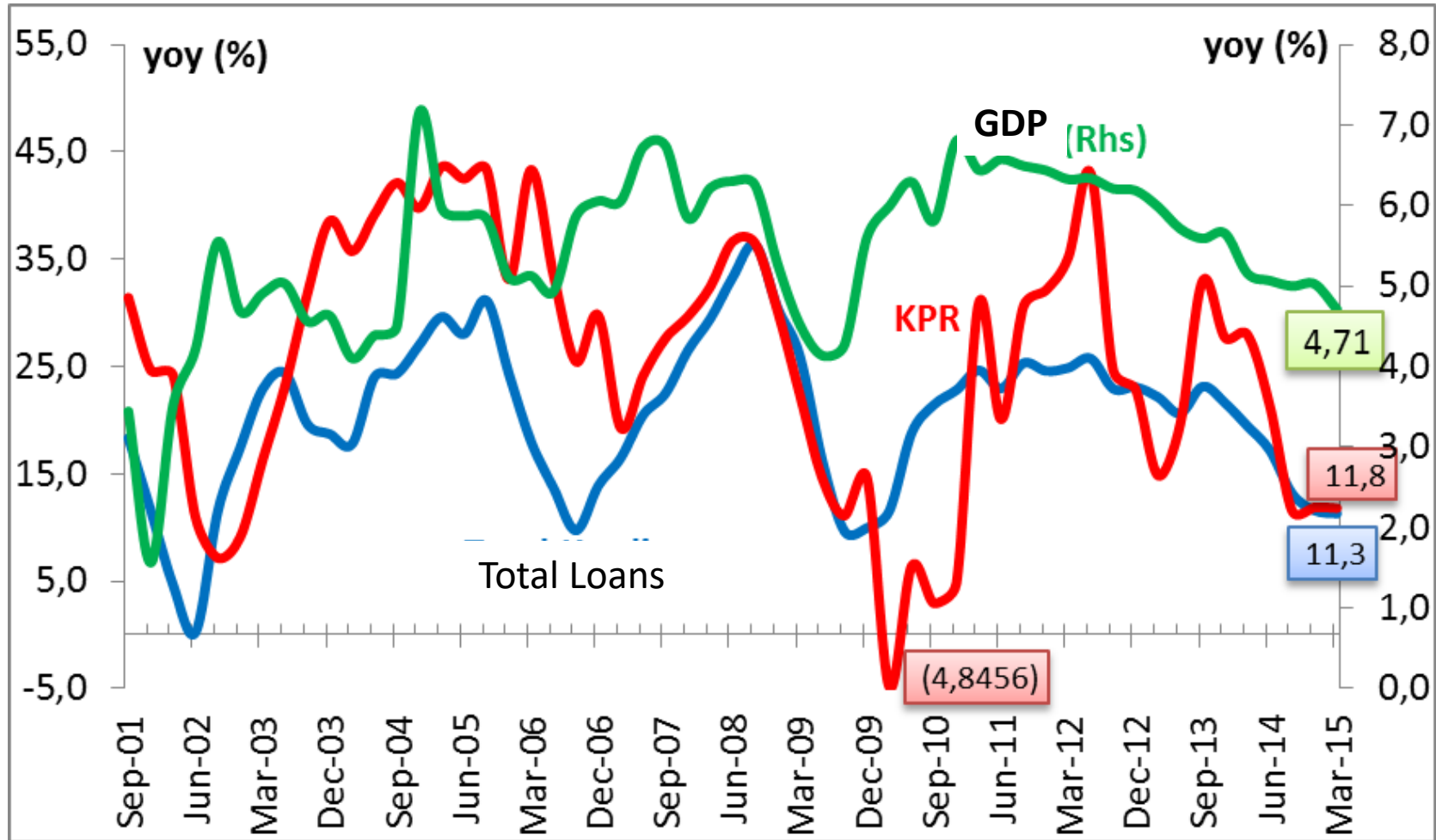
- Loans to property sector tends to follow the increase in property prices, thereby encouraging further risk taking in the property sector.

Acceleration in External Debts

- Tight Monetary Policy (TMP) and stable exchange rate has encouraged domestic firms to borrow money from abroad. It may create maturity and currency mismatches.

Indonesian Experience:

Procyclicality of loans growth, incl. mortgage (KPR)

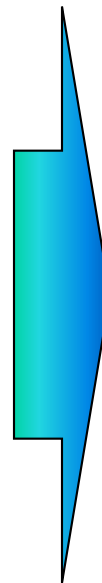
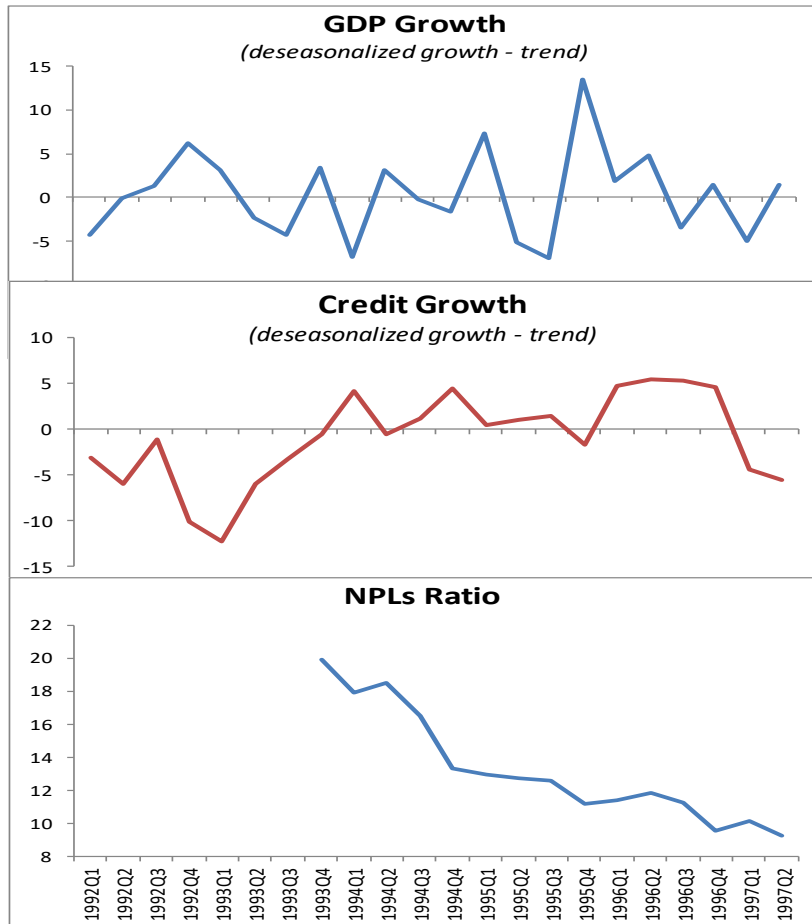


Sumber: Bank Indonesia

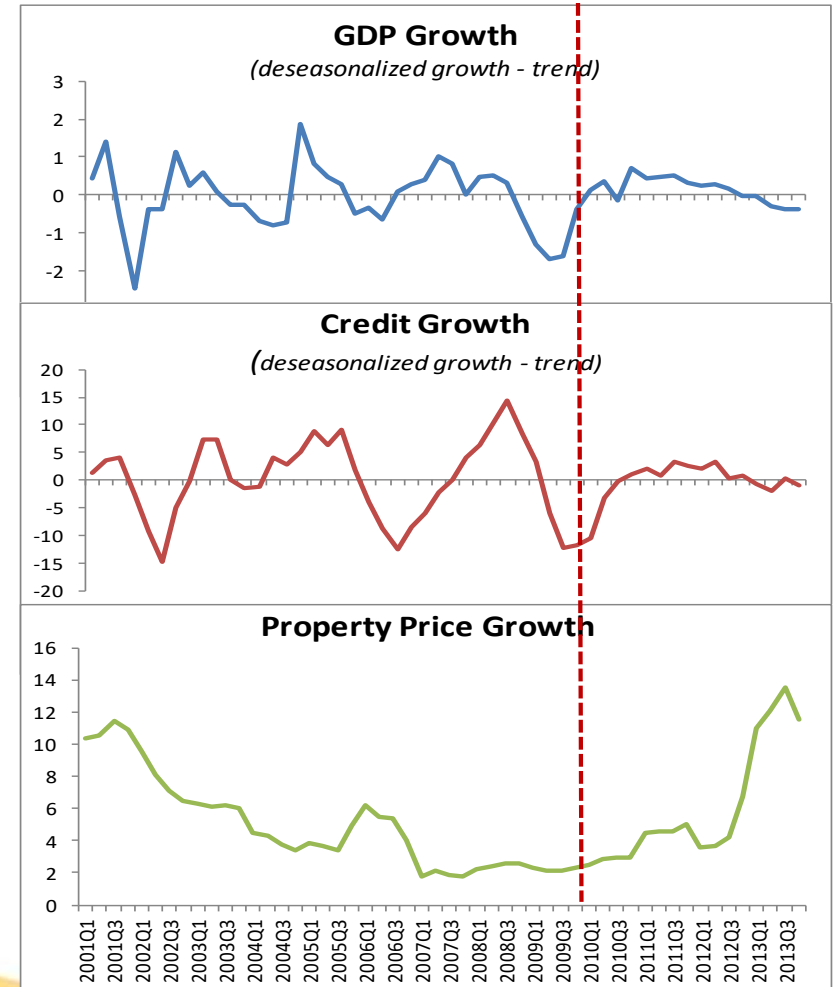
Indonesian Experience:

Very high growth of property loans since mid 2010 has been accompanied by bubble in property prices ...

1992 - 1997



2000 - 2013

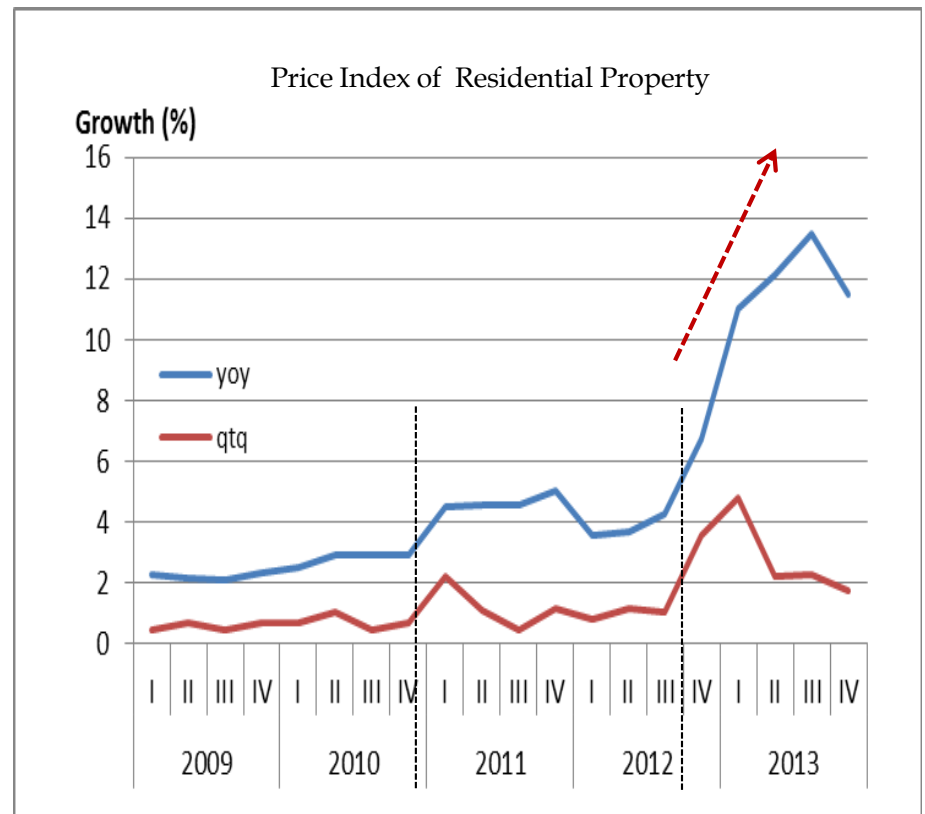


Indonesian Experience:

Risk taking is rampant during this very high property loan growth...

- ❑ Many Debtors have more than 2 mortgage loans at the same time.
- ❑ Property price shot up, leading toward price bubbles..

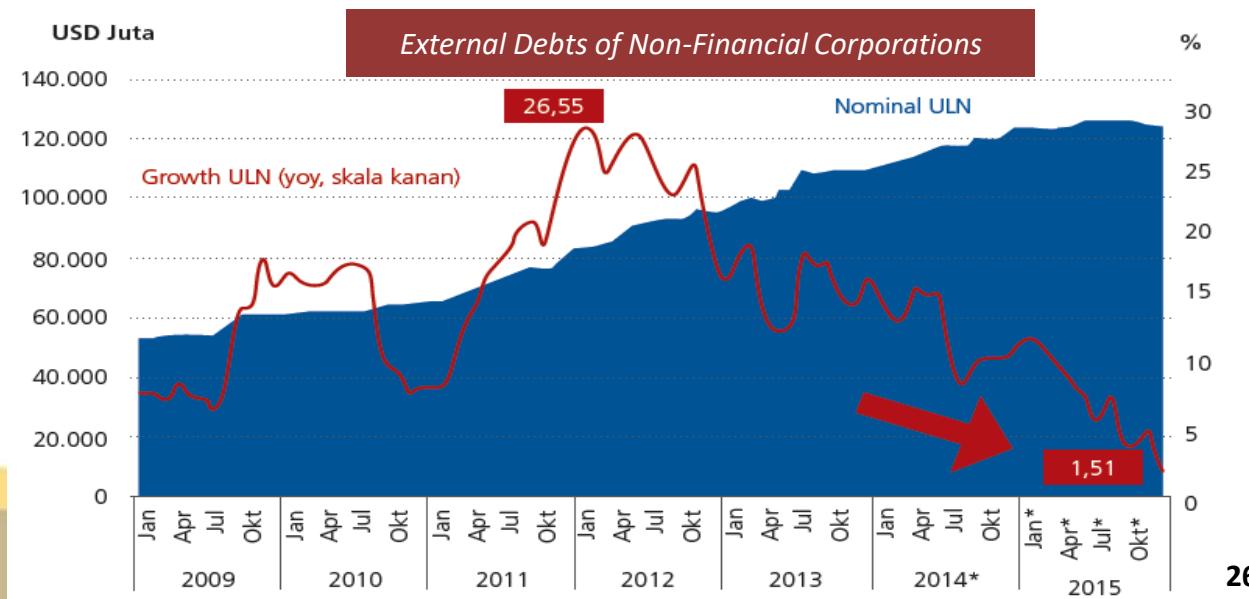
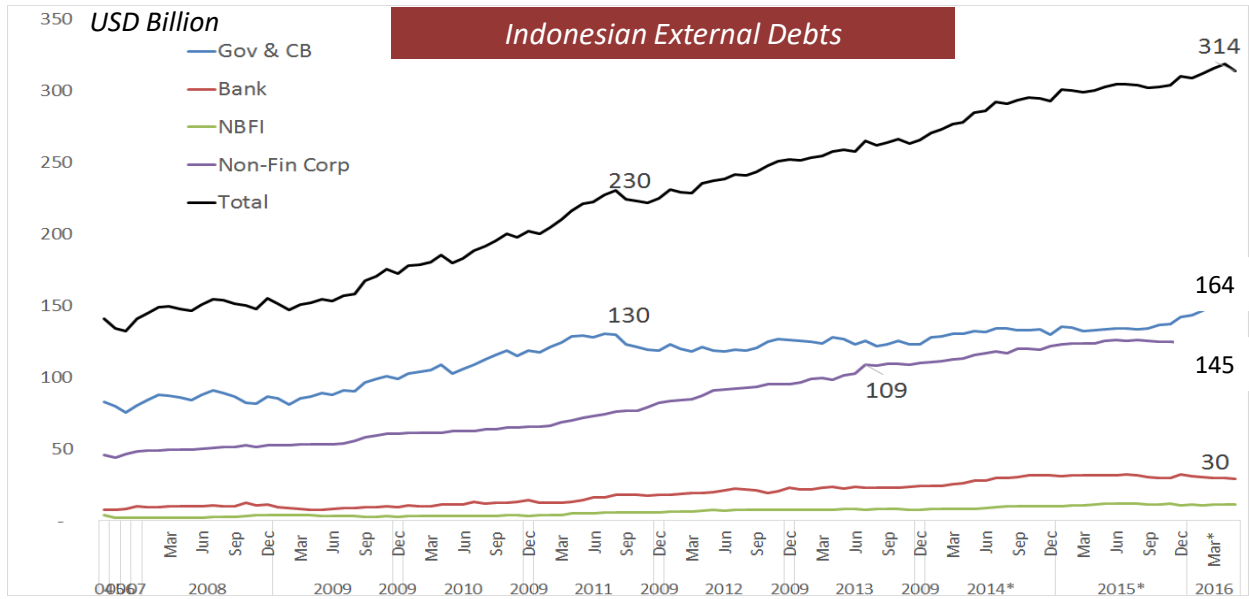
No of Loans	No of Debtors	Share	No of House	Loan Outstanding (Rp Bio)	Share
2	31,368	88.9%	62,736	24,878	72.1%
3-6	2,937	8.3%	8,811	5,796	16.8%
6-9	947	2.7%	4,092	3,211	9.3%
9-12	39	0.1%	292	496	1.4%
12-15	5	0.0%	54	73	0.2%
15-18	-	0.0%	-	-	0.0%
>18	2	0.0%	38	49	0.1%
TOTAL	35,298	100.0%	76,023	34,503	100.0%



* As of April 2013 before the progressive LTV implemented

Indonesia's External Debt, esp. private, is accelerating during 2009 -2012 ...

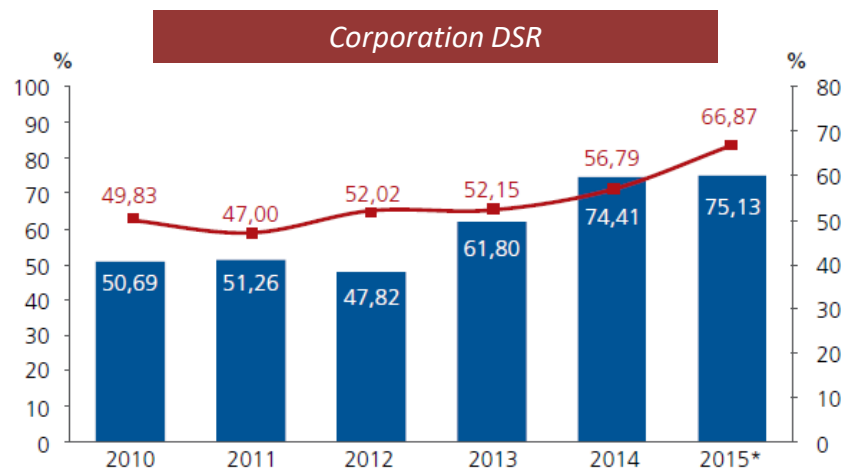
- *Total external debts have increased from 24% (2012) to 36.5% of GDP (Q1 2016)*
- *The ratio of private sector over total external debt is soaring from 36% (2004) to 52% (Q1 2016)*
- *The private sector external debt is slowing sharply since 2012. It might indicate the slowing growth of business expansion*



Balance Sheet of Domestic Corporations shows weakening performance

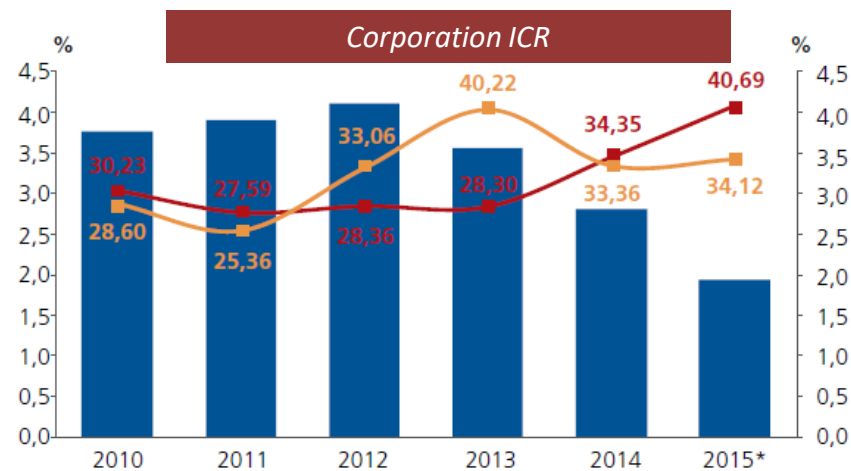
Source: BI FSR, Mar 2016

No.	Sektor	ROA (%)		ROE (%)		DER		TA/TL		Current Ratio		Inventory TO		Asset TO	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Coal		3,44%	1,30%	7,44%	2,71%	1,16	1,01	1,86	1,99	1,95	1,57	0,66	0,59	15,91	16,01
CPO		7,13%	1,79%	13,49%	3,59%	0,87	1,12	2,15	1,89	0,90	0,88	0,79	0,67	9,46	8,44
Rubber		10,44%	5,63%	14,04%	7,92%	0,37	0,45	3,71	3,23	1,93	1,48	0,52	0,41	11,57	9,25
Oil/Gas		-0,70%	0,65%	-1,96%	1,90%	1,92	1,97	1,52	1,51	1,39	1,04	0,30	0,25	17,84	13,60
Metal		1,21%	-1,71%	2,19%	-3,05%	0,88	0,72	2,14	2,39	1,40	1,18	0,67	0,59	3,74	3,99
Agregat		5,80%	4,02%	12,28%	8,64%	1,13	1,16	1,89	1,86	1,45	1,40	6,45	6,16	0,79	0,71



*Posisi TW III

■ DSR (median) ■ % of corporations with DSR > 100 or negative DSR (RHS)



*Posisi TW III

■ ICR (median) ■ % of corporations with ICR < 1.5 (RHS) ■ % debt at risk (RHS)

- **Domestic corporations are weakening. Financial performance is getting worse, reflected by lower ROA, ROE, TA/TL ratio, CR and Assets Turnover. At the same time, DER is increasing, implying higher leverage risk.**
- **The plunge on commodity price has caused corporations in commodity sector to suffer during the last several years. In general, repayment capacity of corporations are weakening as indicated by increased DSR and ICR.**



Bauran Kebijakan

Kebijakan Makroekonomi



Untuk mengurangi ketidakseimbangan eksternal dan internal :

- *Moderasi defisit Transaksi Berjalan*
- *Inflasi yang rendah*
- *Pengelolaan nilai tukar yang fleksibel*

Kebijakan Makroprudensial



- *GWM LDR dan GWMS untuk pengelolaan prosiklikalitas kredit dan penguatan likuiditas perbankan.*
- *LTV untuk pengelolaan permintaan domestik, khususnya yang bersifat spekulatif dan memicu impor.*
- *Penyempurnaan ULN dan CFM untuk mengelola aliran modal yang menyebabkan risk taking berlebih*

Kebijakan Struktural



Meningkatkan financial deepening untuk memperkuat struktur pasar valas dan penyediaan pembiayaan jangka panjang

Kebijakan Mikroprudensial



- *Kebijakan permodalan minimum*
- *Batas Maksimal Penyaluran Kredit (BMPK)*
- *Tingkat Kesehatan Bank (Financial, Risk, Governance)*
- *Relaksasi prudential measures sebagai kebijakan counter cyclical*
- *Recovery Plan dan exit policy*

Kebijakan Fiskal



- *Perubahan tarif pajak, cukai, dan bea masuk*
- *Besaran subsidi (energi dan jaring pengaman sosial)*
- *Belanja pemerintah*
- *Kebijakan permodalan dan dividen BUMN*
- *Discretionary: Tax Amnesty,*



Policy Response: Crisis Preparedness

- Penguatan Crisis Management Protokol melalui UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) No 9 Tahun 2016
 - Memperkenalkan prinsip Bail-in
 - Penguatan peran, tugas dan tanggung jawab Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS melalui koordinasi di KSSK
- Simulasi krisis untuk penguatan koordinasi di tingkat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK)
 - Simulasi dilakukan utk uji coba SOP ketika krisis keuangan terjadi; utk kasus pemberian likuiditas jangka pendek (PLJP Bank Indonesia); utk kasus penanganan bank sistemik dan bank non-sistemik
- Penguatan peran LPS sebagai otoritas resolusi bank, disamping sebagai otoritas penjamin simpanan bank

Mandat baru LPS

Apa yang baru untuk LPS?

Intervensi Dini

- ❖ Persiapan resolusi sejak BDPI (*due diligence*)
- ❖ Saat BDPK, LPS memiliki hak untuk memasarkan bank (PnA);
- ❖ Saat BDPK, LPS menuntut bank untuk menjaga kondisi keuangannya

Banking Restructuring Program (BRP)

- ❖ Kewenangan LPS untuk menyampaikan BRP
- ❖ Aset dan kewajiban BRP dipisahkan dari laporan keuangan LPS
- ❖ LPS memberikan laporan pelaksanaan BRP kepada presiden melalui KSSK

Metode Baru Resolusi Bank: P&A dan *Bridge Bank*

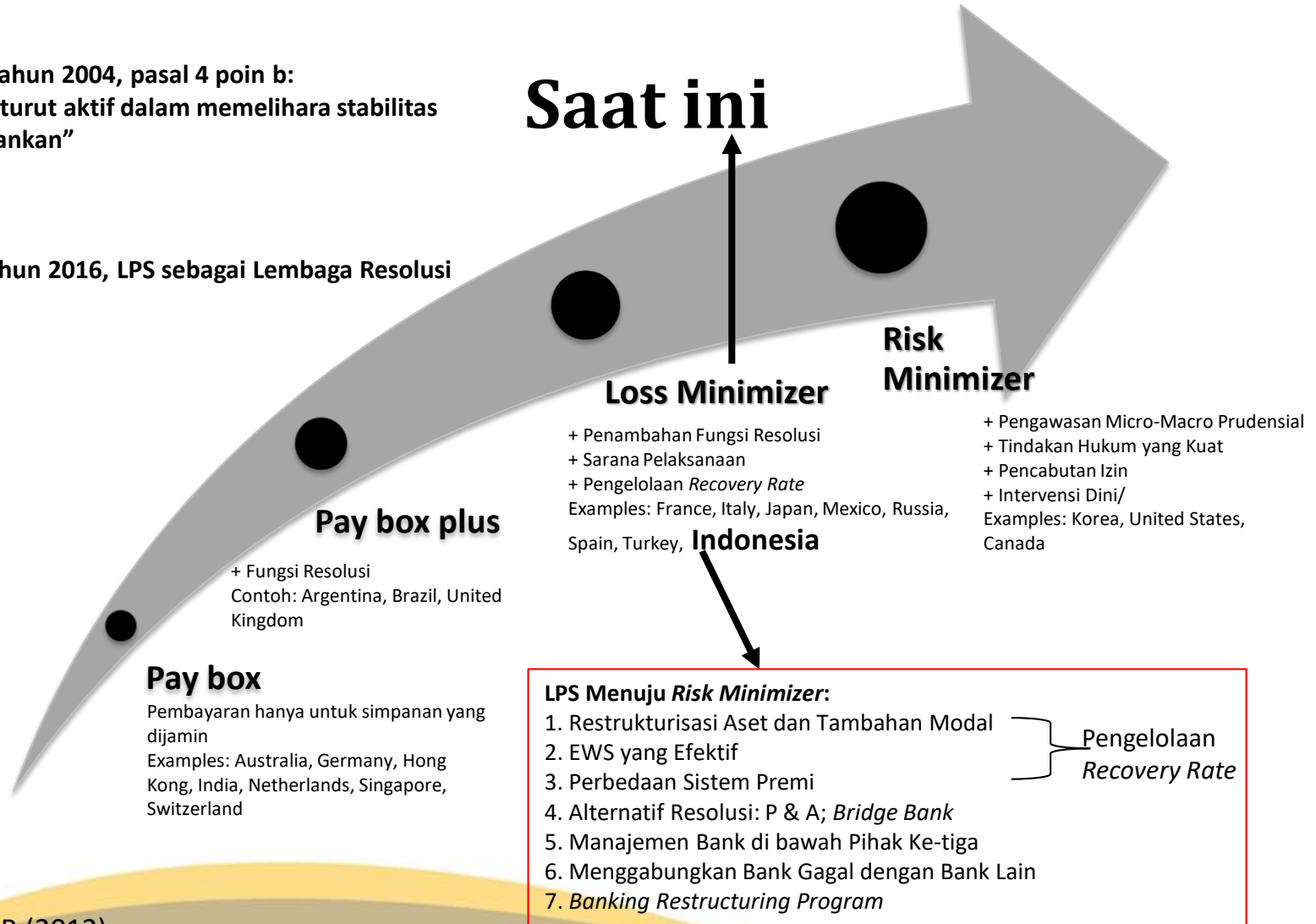
- ❖ P&A : Melakukan transfer aset dan kewajiban bank kepada bank penerima
- ❖ *Bridge bank* (bank perantara) : Mendirikan bank baru dari pengalihan aset dan kewajiban bank bermasalah
- ❖ LPS membayar selisih antara aset dan kewajiban bank bermasalah yang ditransfer ke bank penerima / bank perantara.

Paradigma LPS berkembang dari "Kasir" menjadi "Salah Satu Pelindung Sistem Keuangan"

UU No. 24 Tahun 2004, pasal 4 poin b:
"Peran LPS, turut aktif dalam memelihara stabilitas sektor perbankan"

Plus

UU No. 9 Tahun 2016, LPS sebagai Lembaga Resolusi Bank



CATATAN AKHIR

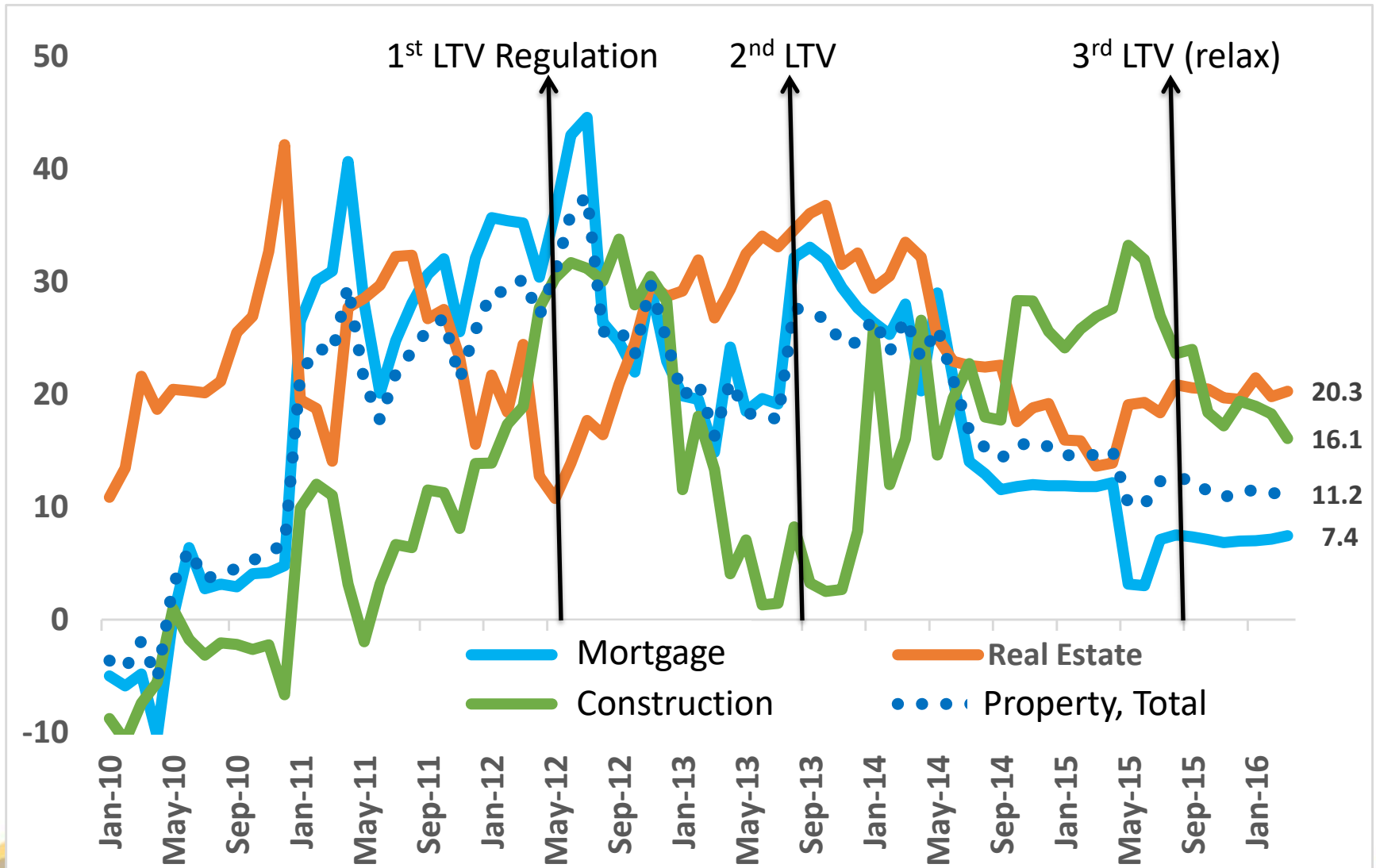




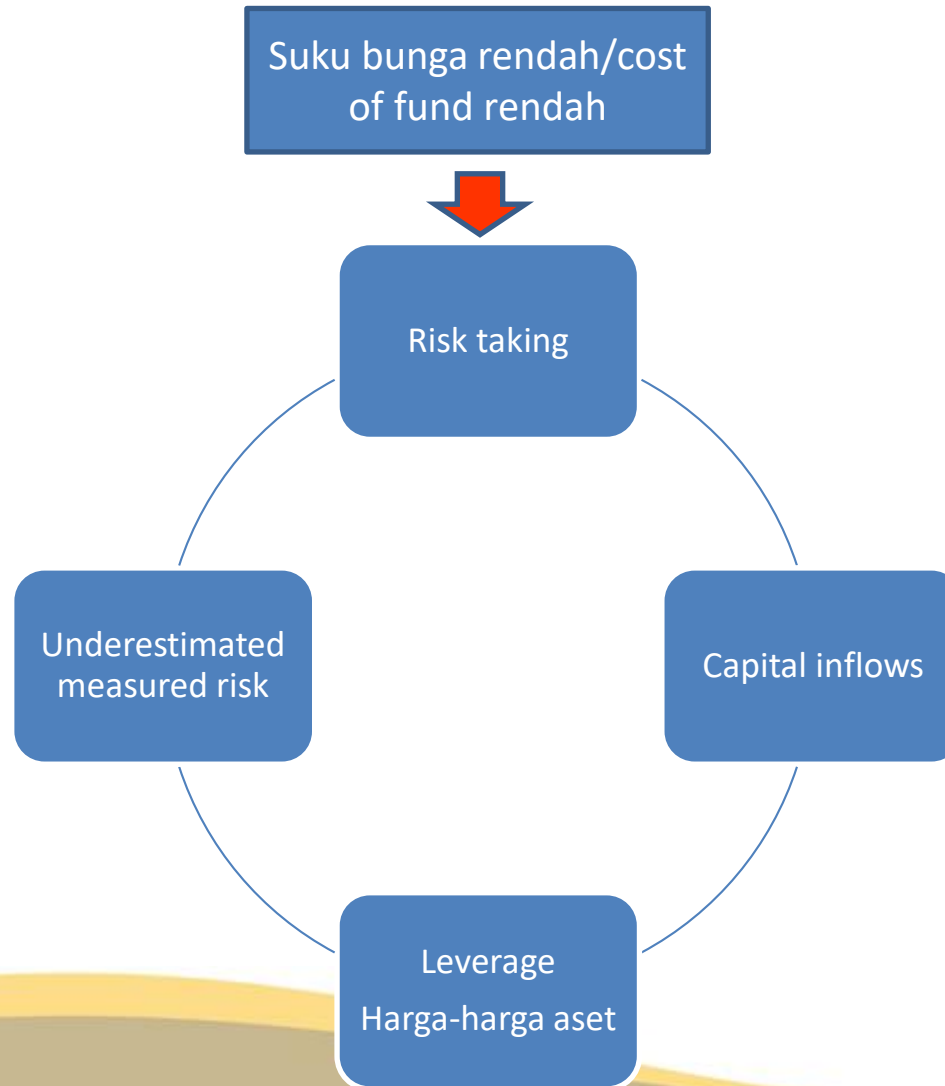
Ekonomi - keuangan dewasa ini cukup sehat dan terkendali, walau belum optimal..

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Q2 2017
PDB (% y/y)	6,4%	6,2%	6,0%	5,6%	5,0%	4,9%	5,0%	5,0%
Inflasi (% y/y)	6,96%	3,79%	4,30%	8,38%	8,36%	3,35%	3,02%	4,37%
Kurs USD/IDR	8.991	9.068	9.670	12.189	12.440	13.795	13.436	13.319
CA (% PDB)	0,7%	0,2%	-2,7%	-3,2%	-3,1%	-2,0%	-1,8%	-2,0%
Fiscal (% PDB)	-0,7%	-1,1%	-1,8%	-2,2%	-2,2%	-2,5%	-2,5%	-2,1%
Utang LN (% PDB)	26,5%	25,0%	27,4%	29,1%	32,9%	36,1%	34,2%	34,4%
Kredit gr.	23,3%	24,7%	23,2%	21,6%	11,6%	10,4%	7,9%	7,5%
KPR	18,6%	26,8%	23,0%	28,3%	14,1%	9,8%	11,4%	8,5%
Konsumsi	22,9%	24,3%	19,8%	13,8%	11,6%	9,1%	8,8%	9,9%
IH Properti	136,65	143,55	153,58	170,90	181,64	190,02	194,54	199,26

Current Issue: LTV Implementation... Effective during upturns?..



Dewasa ini volatilitas di pasar keuangan relatif “dampened” dan suku bunga dunia terendah dalam sejarah ekonomi dunia: Risk taking naik ...





Beberapa Catatan

- Berpengalaman menghadapi berbagai episode turbulensi di sistem keuangan
- Namun demikian perilaku dunia keuangan sangat cepat berubah dan memiliki karakter VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguity)
- Efektivitas kebijakan menjadi lebih sulit diukur
- Dewasa ini perekonomian kita mengalami recovery..inflasi terkendali..defisit Current Account BOP dan deficit fiskal terkendali ..kondisi perbankan sehat...tetapi mengapa ekspansi ekonomi masih lambat?
- Kita harus siap menghadapi “*the new normal*”: likuiditas tinggi; suku bunga rendah; volatilitas tinggi dengan pertumbuhan ekonomi suboptimal

So much we don't know so we cannot be complacent!



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

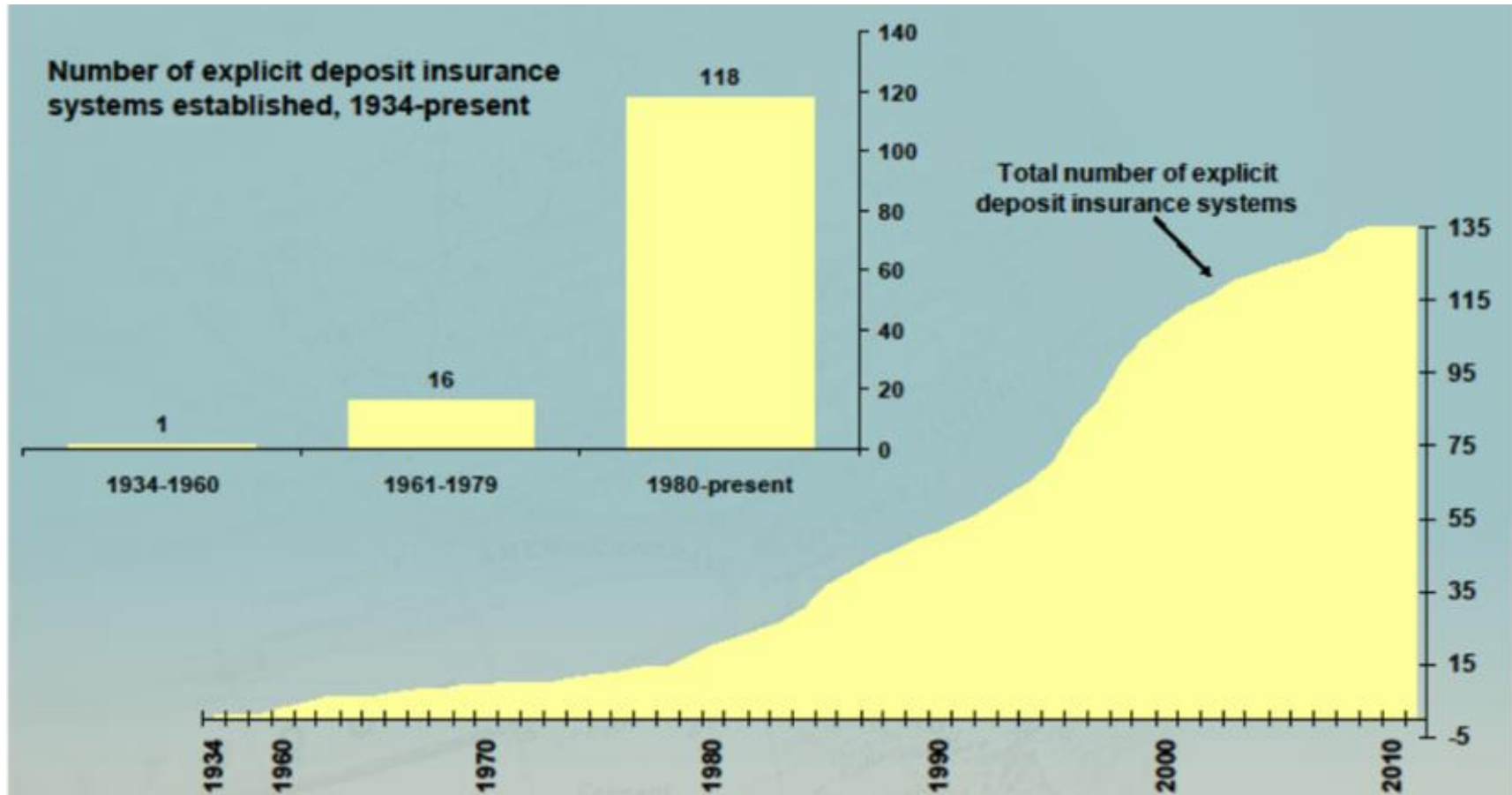
Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

TERIMA KASIH





APPENDIX: Adopsi institusi penjaminan simpanan: meningkat drastis pasca krisis keuangan 1980-an



Sumber: Carns (2011)